

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Maryani, D & Nainggolan, R.R.E (2019, hal. 1-2) pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga atau kekuatan. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Menurut Sumaryo (1991) dalam (Lutfiah, 2021, hal. 19–20) “pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri”. Dalam pelaksanaannya, proses melakukan pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah hal yang dapat dicapai dengan instan, melainkan akan melewati rangkaian proses yang panjang (tidak langsung jadi) untuk sampai pada titik lebih berdaya dari sebelumnya. Dalam pemberdayaan tidak hanya berfokus pada perubahan seperti kognisi, melahirkan keinginan seseorang untuk mengakulturasikan diri saja. Melainkan, juga usaha untuk menciptakan kemampuan masyarakat memobilisasi diri ke atas, melahirkan sikap mandiri dan juga produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masyarakat miskin, berorientasi pada kesetaraan dan lain-lain.

Menurut (Maulina, 2020, hal. 40) pemberdayaan adalah usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri.

Pemberdayaan sosial ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial ekonomi. Pemberdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.

2.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012: 111-112) dalam Hamid, H (2018, hal. 13-14), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk Pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya, seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*) artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki

kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.

- 5) Perbaiki usaha (*better business*) artinya, perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan, dan perbaiki kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.
- 6) Perbaiki pendapatan (*better income*) artinya, perbaiki bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 7) Perbaiki lingkungan (*better environment*) artinya, perbaiki pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
- 8) Perbaiki kehidupan (*better living*) artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
- 9) Perbaiki masyarakat (*better community*) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

2.1.1.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (1987: 63) dalam Maryani, D & Nainggolan, R.R.E (2019, hal. 13-14).

a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan

masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b) Tahap Pengkajian “*Assessment*”

Tahap ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

c) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

d) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

e) Tahap “Implementasi” Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antarpetugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

f) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

g) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

2.1.1.4 Faktor Pendorong Terjadinya Pemberdayaan

Menurut Hutomo (2000: 8-11) dalam (Firmandas, 2021, hal. 57–59) terjadinya pemberdayaan ekonomi melalui faktor pendorong sebagai berikut:

(1) Sumber Daya Manusia

Salah satu komponen terpenting terhadap setiap program pemberdayaan ekonomi yaitu melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, harus dapat memberikan penanganan yang serius terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Karena sumber daya manusia merupakan unsur yang paling fundamental terhadap penguatan ekonomi.

(2) Sumber Daya Alam

Salah satu aspek terpenting dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sumber daya alam, karena sumber daya alam dapat dimanfaatkan agar dapat memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejak dahulu kala, sumber daya alam sudah dimanfaatkan dari masa kehidupan nomaden sampai masa industrialisasi.

(3) Permodalan

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah masalah permodalan. Akan tetapi, terdapat hal yang perlu untuk dicermati dalam aspek permodalan ini yaitu, bagaimana pemberian modal yang tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan juga dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah supaya dapat berkembang ke arah yang lebih baik atau maju.

(4) Prasarana Produksi dan Pemasaran

Untuk meningkatkan produktifitas serta menumbuhkan usaha, maka diperlukan prasarana produksi serta pemasaran. Apabila hasil produksi tidak dapat untuk di pasarkan, maka usaha tersebut merupakan hal yang sia-sia. Untuk hal ini, komponen lain yang dianggap penting dalam pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi yaitu dengan menyediakan prasarana produksi serta pemasaran. Dengan tersedianya prasarana pemasaran seperti alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan dapat mengurangi rantai pemasaran dan hingga akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha kecil serta pengusaha menengah. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan tersedianya prasarana

produksi dan pemasaran merupakan hal penting agar dapat membangun usaha sosial yang lebih maju pada sisi pemberdayaan ekonomi.

2.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut KBBI dalam (Sholihati, 2020, hal. 12) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan, sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri.

Selain itu, menurut (Zunaidah et al., 2021, hal. 48) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Seyadi dalam (Hartini, 2019, hal. 10) peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap peningkatan perekonomian, yaitu:

- a) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pondasinya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pasal 3 bahwa pendirian BUM Desa bertujuan:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan pekerjaan;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut (Saniyah, 2019, hal. 54–55) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yaitu:

- (a) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- (b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (c) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- (d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- (e) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- (f) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Dalam suatu program juga tentu perlu manajemen atau pengelolaan yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh (Sulaeman & Hastina, 2021, hal. 1) bahwa manajemen ialah seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Manajemen menjadi sangat penting untuk menjalankan organisasi mencapai tujuan secara efektif. Adapun fungsi manajemen menurut George R. Terry pada tahun 1985 dalam (Muhfizar et al. 2021, hal. 5-8) yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan/ penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), disingkat dengan POAC.

(1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam proses manajerial. Perencanaan sifatnya pedoman pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, guna mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Hal-hal penting yang terdapat dalam perencanaan berupa alokasi sumberdaya, jadwal dan aksi-aksi yang penting lainnya. Rencana dapat dibagi atas beberapa kategori, yaitu rencana strategi dan rencana operasional. Rencana strategi merupakan rencana umum yang berlaku bagi sebuah organisasi ataupun lembaga, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota.

(2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai tindakan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar secara efektif dan efisien dapat mengeksekusikan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam rencana. Pengorganisasian ini memiliki fungsi pembagian tugas secara menyeluruh berdasarkan struktur organisasi.

(3) Pelaksanaan/ penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

(4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berperan melakukan koreksi selama proses manajerial berlangsung, mulai dari *planning*, *organizing*, hingga *actuating*. Dengan adanya pengawasan ini, maka kekeliruan dalam fungsi manajemen dapat dihindarkan. Di samping peran koreksi pengawasan ini juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolanya atau anggotanya dan unjuk kerja atau hasil kerjanya. Dengan evaluasi ini dapat diketahui taraf pencapaian target dari plan, serta sekaligus dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat ketercapaian target.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentu saja tidak akan berhasil tanpa adanya sebuah partisipasi dari masyarakat. Dimana partisipasi sejajar dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota masyarakat. Asngari (2001) dalam (Bahua, M.I., 2018, hal. 4) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya.

Adapun tujuan dari partisipasi menurut Schiller dan Antlov dalam (Hetifah, 2003, hal. 152) ialah sebagai berikut:

1) Menciptakan Visi Bersama

Merumuskan misi dan mandat serta nilai-nilai yang dianut atau menjadi dasar suatu organisasi serta visi itu kedepan. Tujuannya ialah untuk menstimulasi debat dan bagaimana mempengaruhi tujuan masa depan.

2) Membangun Rencana

Setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, maka dengan bekal itu dapat segera dibuat suatu proses lanjutan untuk membangun rencana.

3) Mengumpulkan Gagasan

Dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis, dengan maksud mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses partisipasi.

4) Menentukan Prioritas atau Membuat Pilihan

Bertujuan untuk mengorganisir berbagai ide yang muncul dalam proses partisipasi.

5) Menjaring Aspirasi atau Masukan

Bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu isu atau rencana antar pemerintah, perencanaan dengan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan, memberikan alternatif desain, pilihan investasi beserta pengelolanya.

6) Mengumpulkan Informasi atau Analisis Situasi

Bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta bagaimana mengoptimalkan kelemahan dan ancaman untuk mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan menurut Theresia, et al (2014) dalam (Hajar, S et al., 2018, hal. 32), yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam

proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Siti Maulina. 2020. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian dengan pendekatan secara kuantitatif. Hasil penelitian ini dapat dikatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, mengatasi kemiskinan merupakan upaya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri, baik secara ekonominya maupun sosial budayanya. Akan tetapi, dalam upaya pemberdayaan tersebut masih sangat kurang, sehingga hal-hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan upaya pengentasan kemiskinan masih belum terlaksana dengan baik.

2.2.2 Aminatuz Zuhriya. 2020. Strategi BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ialah upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BUMDES Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember melalui program bank sampah yaitu dengan cara menggiatkan usaha bina manusia dengan cara pemberian sosialisasi, bina usaha dengan cara menciptakan program bank sampah Dukuh Dempok, bina lingkungan dengan cara pengurangan sampah, dan yang terakhir yakni bina kelembagaan dengan cara BUMDES sebagai wadah dari terciptanya program bank sampah Dukuh Dempok. Dengan adanya hal tersebut, kehidupan masyarakat mengalami perubahan, dimana dulu sampah yang masyarakat resahkan dan dianggap hanya dapat menimbulkan sebuah musibah kini telah berubah menjadi barang tak terpakai yang masih memiliki nilai ekonomis. Sampah-sampah yang ada disekitar mereka kini mulai diperhatikan, dikumpulkan dan kemudian disetorkan ke Agen Bank Cabang Pembantu yang ada disetiap dusunnya kemudian akan

diolah kembali oleh pihak bank sampah Dukuh Dempok. Hal inilah yang meningkatkan kenyamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat dari segi sosial.

- 2.2.3 Megi Firmandas. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut sudah baik namun belum terlalu signifikan untuk sebuah pemberdayaan ekonomi yang komprehensif. Lantaran jika berpacu pada proses pemberdayaan ekonomi yaitu bantuan modal, pembangunan prasarana, bantuan pembinaan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan. BUMDES Bina Bersama hanya menjalankan program pemberdayaan pada bantuan modal dan pembangunan prasarana. Bantuan modal merupakan salah satu program yang dilakukan oleh BUMDES Bina Bersama melalui unit usaha simpan pinjam yang aktif pada awal terbentuknya BUMDES Bina Bersama. Akan tetapi unit usaha simpan pinjam sudah dinonaktifkan dikarenakan tidak lancar. Kemudian pembangunan prasarana yaitu segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam pemberdayaan ekonomi. Pembangunan prasarana oleh BUMDES yaitu berupa toko yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Tangan-Tangan Cut yang ingin membuka suatu usaha-usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian maupun pendapatan. Tidak tercapainya hasil yang maksimal dari peranan BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan tidak tercukupinya strategi program-program yang menjadi tolak ukur pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu tidak adanya pendampingan atau pelatihan usaha, tidak adanya penguatan kelembagaan oleh BUMDES Bina Bersama, dan tidak adanya penguatan kemitraan usaha yang dilakukan oleh BUMDES.

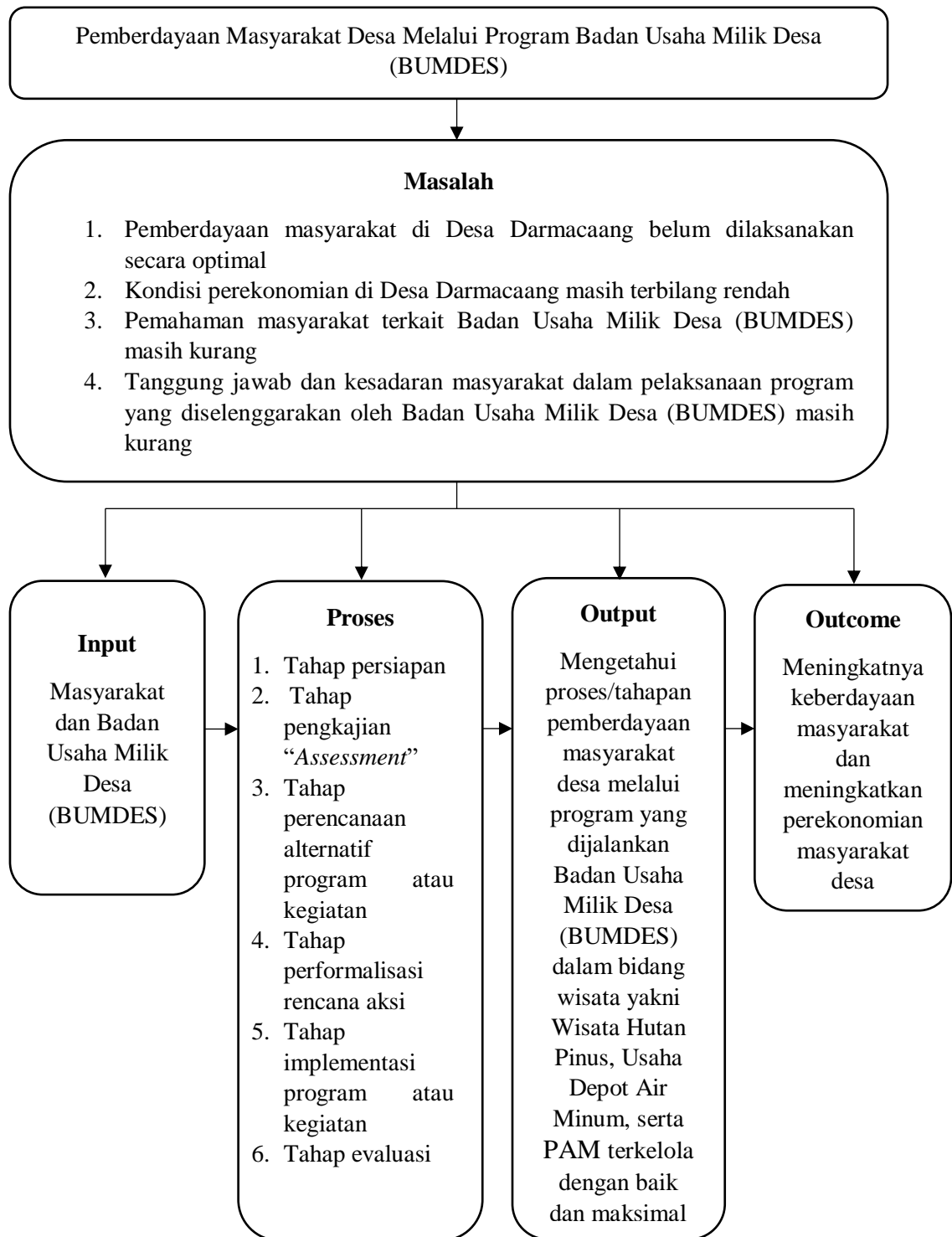
- 2.2.4 Nurul Fitri, Anwar Deli, dan Fajri. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana gampong pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Capa Paloh secara umum telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Diperoleh nilai efektivitas yaitu 119, 2% yang berarti sangat efektif, dan nilai efisiensi diperoleh sebesar 304,21% yang berarti tidak efisien.
- 2.2.5 Anil Ma`rufi. 2022. Pengaruh Kontribusi Program BUMDES Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi program BUMDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mario Pulana Desa Mario dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDES berdasarkan Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, yaitu dapat meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan dan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Subakti, H. et al (2022, hal. 68) mengungkapkan bahwa kerangka teoritis atau konseptual menjelaskan masalah penelitian yang menjelaskan hubungan variabel penelitian dengan mendasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk diagram biasanya berbentuk gambar model penelitian. Kerangka konseptual lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena merupakan deduksi logis untuk perumusan hipotesis. Kerangka konseptual adalah suatu rancangan yang dapat menegaskan tentang dimensi-dimensi kajian utama penelitian serta mengungkap tentang perkiraan hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Atas dasar itu, kerangka konseptual merupakan panduan bagi peneliti dalam proses penelitiannya, baik memutuskan karakteristik data yang harus dikumpulkan, strategi dalam melakukan kategorisasi, maupun dalam penemuan relasi antara kategori.

Penelitian ini membahas mengenai proses pemberdayaan masyarakat desa melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menjadi berdaya sehingga mampu meningkatkan perekonomian di masyarakat desa. Input dari permasalahan yang diteliti ialah Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dengan melalui proses yaitu pengelolaan program yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di bidang wisata dan usaha depot air minum dengan melakukan beberapa tahap yakni tahap persiapan, dimana dalam tahap ini terdapat dua tahapan yang perlu dikerjakan yaitu penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat dan penyiapan lapangan. Tahap pengkajian "*assessment*", dalam tahap ini petugas berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki klien agar program yang dilakukan tidak salah sasaran. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Tahap formalisasi rencana aksi, dalam tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi

permasalahan yang ada. Tahap implementasi program atau kegiatan, dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antarpetugas dan masyarakat merupakan hal penting. Tahap evaluasi, pada tahap ini dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program tersebut dapat dicapai sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya dapat diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu. Sehingga output yang dihasilkan yaitu dapat mengetahui proses/tahapan pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan juga program yang dijalankan yakni wisata hutan pinus dan usaha depot air minum terkelola dengan baik dan maksimal. Dengan itu mendapatkan outcome yakni meningkatnya keberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang akan dijadikan pertanyaan dalam penelitian ini ialah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis?